

**PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
MENGELOLA SEKTOR PARIWISATA PANTAI
DI KECAMATAN SIROMBU KABUPATEN
NIAS BARAT**

SKRIPSI

OLEH:


**KUSMALINA
14.852.0020**




**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

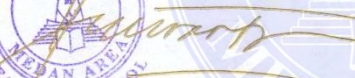
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor
Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat
Nama : Kusmalina
NPM : 14.852.0020
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda, M.AP
Pembimbing I


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Pembimbing II




Dr. H. Heri Kusmanto, MA
Dekan

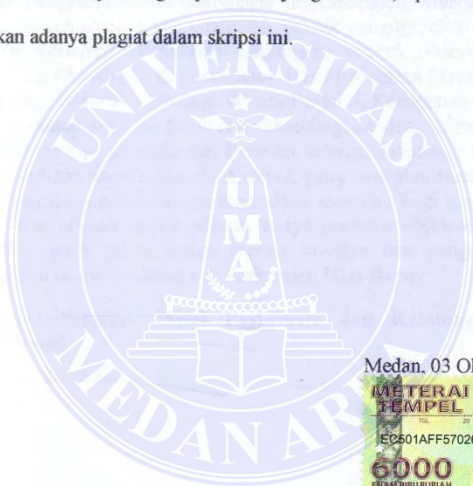

Dra. Hj. Rosmala Dewi, M. Pd
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 03 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 03 Oktober 2018



Kusmalina
148520020

ABSTRAK

Pariwisata memiliki peluang yang secara prospektif dapat menguntungkan, untuk itu diperlukan juga iklim yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerja sama antar negara (persahabatan antar bangsa), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) seperti observasi, wawancara dan *Library research* (Penelitian Kepustakaan). Hasil penelitian Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Wisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peranan lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peranan sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi objek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Nias Barat.

Kata Kunci : Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan, Pariwisata Pantai

ABSTRACT

Tourism has an opportunity that can enable, so it is also necessary conducive climate in order to ensure the ongoing activities, and increase opportunities. Comparison In Various Stays Of Various Sites (foreign exchange, taxes), Inter-state cooperation (international friendship), and other (Emerging) facets for foreign tourists). The purpose of this research is to know the role of Tourism and Culture Department in West Nias Regency. This research is included in this type of qualitative research. Data collection techniques used are Field Research, Research Research and Library Research. The results of research on the Role of the Department of Tourism and Culture in the Management of Beach Tourism in Sirombu District West Nias Regency as facilitators are used with other roles as motivators and dynamicators. The role of facilitator in the form of visualization of the infrastructure of the objects that mostly still be borne by the Department, the facility of distribution of stimulant fund aid for the people who want to develop a tourist object, the promotion of tourism object, and the facilities that give to the parties like investors and tourist entrepreneurs to develop the tourism business in West Nias Regency.

Keywords: *The Role Of Tourism And Culture Department, Management, Beach Tourism*



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Humene Pada tanggal 25 Maret 1994 dari ayah Abdul Murad dan ibu Sawalin Pane. Penulis merupakan putri kandung ke-5 dari 8 bersaudara. Tahun 2013 Penulis lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa Timur dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) Ilmu Administrasi Publik.

Terselesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini serta atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Medan Area.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan skripsi.

5. Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
6. Kedua orang tuaku (Ayahanda dan Ibunda), Kakak, keluarga di Medan dandi Nias atas kepercayaan, kesabaran, dukungan moril dan materi serta semangat yang tak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah orang yang paling berarti dalam hidupku.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014 untuk keceriaan dan kenangan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan studiku.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ibarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Medan, 03 Agustus 2018
Penulis

Kusmalina

DAFTAR ISI

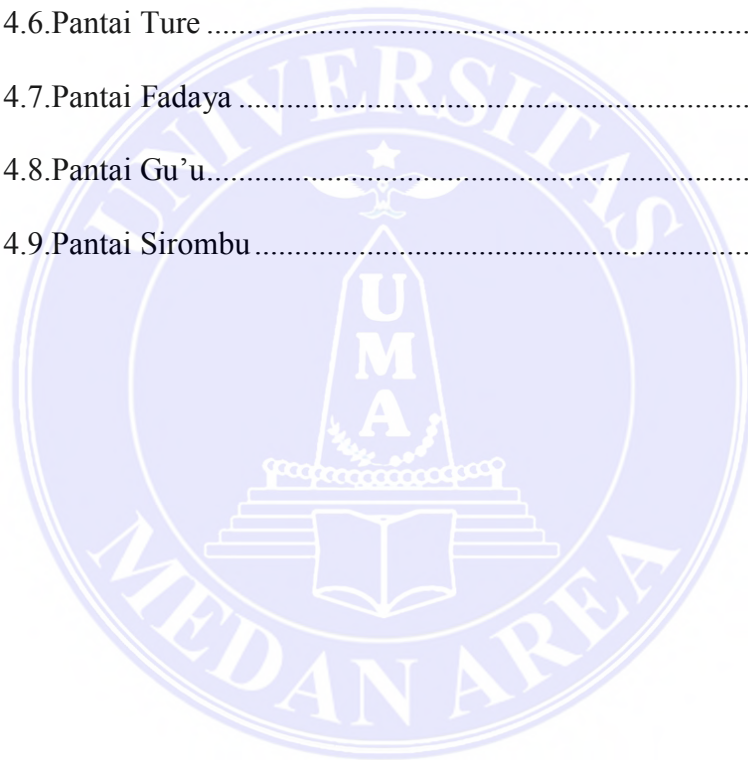
	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Pengertian Peranan	4
2.2. Pengertian Pengelolaan	5
2.3. Pengertian Pariwisata	7
2.4. Potensi Pariwisata	13
2.5. Dinas Daerah.....	14
2.6. Penelitian Terdahulu	15
2.7 Kerangka Pemikiran	18
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.3. Informan Penelitian.....	19
3.4. Teknik Pengumpulan Data	20
3.5. Teknik Analisis Data.....	20
3.6. Keabsahan Data	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat	24
4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat	25
4.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Barat	25
4.4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat	30
4.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.5.1. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat	47

4.5.2.Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat	60
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4.1.Struktur Organisasi.....	30
Gambar 4.2.Pulau Asu	54
Gambar 4.3.Pulau Bawa.....	55
Gambar 4.4. Pantai Fari'I	56
Gambar 4.5.Pantai Valaete.....	57
Gambar 4.6.Pantai Ture	58
Gambar 4.7.Pantai Fadaya	58
Gambar 4.8.Pantai Gu'u.....	59
Gambar 4.9.Pantai Sirombu.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Wawancara	68
2. Lampiran Dokumentasi	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata memiliki peluang yang secara prospektif dapat menguntungkan, untuk itu diperlukan juga iklim yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, dan membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal sehingga dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada gilirannya akan member dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar negara (persahabatan antar bangsa), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beranekaragam yang berpotensi untuk diolah maupun dimanfaatkan.

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah dan keindahan panorama alam yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Salah satu

wilayah di Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata alam adalah Kabupaten Nias Barat tepatnya di Kecamatan Sirombu. Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat memiliki potensi wisata pantai cukup banyak dengan prospek ke depan yang sangat menjanjikan. Saat ini, objek wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat terdiri dari 2 (dua) pulau dan 7 (tujuh) pantai. Yaitu Pulau Asu, Pulau Bawa, Pantai Fari'i, Pantai Valaete, Pantai Ture, Pantai Wazi, Pantai Fadaya, Pantai Gu'u, dan Pantai Sirombu. *(Sumber: Redaksi MetroRakyat).*

Saat ini sektor pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat belum berjalan secara optimal. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan devisa Negara, pendapatan masyarakat dan daerah. Meskipun Nias Barat memiliki sejumlah potensi alam yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan kurang terawat.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis mengangkat judul “Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat”.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?

2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peranan dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:1051), “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa”.

Menurut Soekanto(2012:212), “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Dari sudut pandang yang lain, “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa”(Poerwadarminta, 1995:751).

Konsep tentang peran menurut Komarudin (1994:768) yakni sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

2.2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisaan, penggerakan, dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pengertian pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain.
3. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut George R. Terry dalam Malayu (2016:2), "Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya".

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
3. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
4. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Dalam rangka pengelolaan pariwisata ini, maka dilakukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada (Pemerintah dan Swasta), serta pihak lain yang diharapkan mampu mendukung tumbuh kembangnya pariwisata seperti masyarakat lokal.

Berikut merupakan tiga aktor utama yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Gayatri (2005:95) :

- a. Masyarakat, yaitu masyarakat umum yang tinggal di sekitar obyek wisata, yang juga merupakan pemilik sah dari berbagai sumberdaya modal pariwisata, seperti kebudayaan, tokoh masyarakat, intelektual, LSM serta media massa.
- b. Swasta, yaitu seperti asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
- c. Pemerintah, yaitu mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas dalam kaitannya dengan wewenang yang dimilikinya untuk mengembangkan pariwisata di wilayahnya, yang mencakup dari seluruh penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (*Fasilitator*), kerjasama yang sinergis dengan berbagai *stakeholder* pariwisata (*Dinamisator*),

serta menjadi pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (*Motivator*).

2.3. Pengertian Pariwisata

Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini “pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan” (Sinaga, 2010:12).

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 Bab I ayat 1 pasal 3 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu yang didukung berbagai fasilitas untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara (Ismayanti, 2010:3).

Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Soekadijo (2000:3) menjelaskan “Pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu”.

Sedangkan Wahab (2003:5) menjelaskan “Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri”.

Pariwisata memiliki berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang dapat disesuaikan dengan minat ataupun kebutuhan wisatawan. Kegiatan wisata yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat tersendiri bagi masing-masing wisatawan. Menurut Suwanto (2004:14-17) terdapat “beberapa macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu segi jumlahnya, segi kepengaturannya, segi maksud dan tujuan, segi penyelenggarannya”.

Dari segi jumlahnya, wisatawan dibedakan atas *Individual Tour* (wisatawan perorangan) yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-isteri, *Family Group Tour* (wisata keluarga) yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain, *Group Tour* (wisata rombongan) yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan anggotanya. Biasanya paling sedikit 10 orang, dengan dilengkapi diskon dari perusahaan principal bagi orang yang sebelas. Potongan ini berkisar antara 25 hingga 50 % dari ongkos penginapan atau penerbangan.

Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas *Pra-arranged Tour* (wisata berencana) yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun objek-objek yang akan dikunjungi, *Package Tour* (paket wisata) yaitu perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang telah bekerja sama menyelenggarakan paket wisata yang mencakup biaya perjalanan, hotel, ataupun fasilitas lainnya yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata, *Coach Tour* (wisata dipimpin) yaitu suatu paket perjalanan eksekursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara rutin, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula, *Special Arranged Tour* (wisata khusus) yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai keinginannya, *Optional Tour* (wisata tambahan) yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.

Dari segi maksud dan tujuan, wisata dibedakan atas *Holiday Tour* (wisata liburan) yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang, dan menghibur diri, *Familiarization Tour* (wisata pengenalan) yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya, *Educational Tour* (wisata pendidikan) yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya, *Scientific Tour* (wisata

pengetahuan) yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan, *Pileimage Tour* (wisata keagamaan) yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan, *Special Mission Tour* (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan maksud khusus, misalnya misi dagang, kesenian, dan lain-lain, *Hunting Tour* (wisata perburuan) yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata.

Dari segi penyelenggarannya, wisata dibedakan atas Ekskursi (*Excursion*) yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata, *Safari Tour* yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek wisata pada umumnya, *Cruise Tour* yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat dengan menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya, *Youth Tour* (wisata remaja) yaitu kunjungan wisata yang diselenggarakan khusus bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan negara masing-masing, *Marine Tour* (wisata bahari) yaitu suatu kunjungan ke objek wisata khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan *wreck-diving* (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap.

Ada beberapa komponen pokok yang secara umum digunakan dalam memberikan batasan mengenai pariwisata, yaitu *Traveler*, *Visitor*, *Tourist*.

Traveler, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas, *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya kurang dari setahun dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan dan *Tourist*, yaitu bagian dari *visitor* yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Apabila diperhatikan ketiga hal tersebut, maka pariwisata memiliki beberapa komponen penting yang terkandung di dalamnya, antara lain: *traveler*, *visitor* dan *tourist*, masing-masing komponen mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat dikatakan sebagai daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991:11), syarat-syarat tersebut adalah:

1. *What to see*, di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan, yang meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata.
2. *What to do*, ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.

3. *What to buy*, tempat tujuan wisata harus menyediakan fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai cinderamata untuk di bawa pulang.
4. *What to arrived*, didalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi obyek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.
5. *What to stay*, bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di obyek wisata itu. Diperlukan penginapan-penginapan.

Selain itu, objek wisata dikatakan memiliki daya tarik jika:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya saran dan prasarana untuk melayani para wisatawan yang hadir.
5. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
6. Obyek wisata mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Suatu pariwisata mempunyai faktor-faktor yang dapat membentuk daya tarik, yang dapat membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Yaitu: Atraksi wisata, Transportasi, Akomodasi, Fasilitas penunjang dan Prasarana.

1. Atraksi wisata yaitu daya tarik wisata utama suatu objek wisata yang mempengaruhi minat pengunjung untuk menikmatinya
2. Transportasi, yaitu sarana pencapaian ke tempat daerah tujuan wisata, hal ini berkaitan dengan kemudahan pencapaian dan tingkat aksesibilitas.
3. Akomodasi, yaitu pendukung kegiatan pariwisata yang bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan dan kepuasan.

4. Fasilitas penumpang, meliputi fasilitas umum seperti telepon umum, mushola/masjid, toilet, dan fasilitas lain.
5. Prasarana, seperti penerangan, air bersih dan lain-lain.

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

2.4. Potensi Pariwisata

Kata potensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *potencial*, mengandung makna sebagai (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi “Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya”. Sedangkan menurut Wiyono (2006:37) “Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut”. Serta menurut Prihadi (2004:6) “Potensi biasa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal”.

Dengan kata lain, potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri.

2.5. Dinas Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi”.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. (Sumber: Wikipedia).

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas daerah dan bertugas sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ALVINITA, dkk (2013, dengan judul Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Mahengetang Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mahangetang ini adalah Salah satu objek yang langka dan merupakan keajaiban dunia. Objek wisata alam yang terletak sekitar 18 mil dari kota Tahuna, dapat ditempuh dengan perahu sekitar dua jam dari ibu kota Sangihe itu memiliki daya tarik tersendiri. Pesona wisata dimiliki objek wisata itu sangat menarik, sebab gunung api di bawah laut hanya satu-satunya di Indonesia. Wisatawan juga dapat melihat wisata budaya seperti Makam Raja Santiago, Rumah Raja Mocodompis dan objek wisata lainnya adalah Pulau Mendaku, keindahan laut Pulau Mendaku ini memiliki berbagai jenis terumbu karang dan ikan berwarna warni dengan pantainya yang berpasir putih. Berbagai macam objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sangihe mempunyai potensi yang cukup baik yang dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah. Berbagai macam objek wisata tersebut menawarkan berbagai macam pesona yang dimiliki masing-masing objek wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Bahwa Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata masih belum optimal sesuai hasil penelitian masih banyak hambatan dan kendala dalam mengembangkan objekwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu dana yang terbatas dapat mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata daerah karena APBD masih belum cukup untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rendahnya informasi

Pariwisata yang teroganisir dan terarah untuk dapat dijangkau wisatawan, kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan serta pariwisata, dan rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata di daerah.

Penelitian terdahulu juga dilakukan Madonna, (2012) dengan judul Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ke'te Kesu Di Kabupaten Toraja Utara. Karakter warga Toraja yang kondusif bagi kepariwisataan itu belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat objek wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter. Walaupun keadaan seperti itu belum sepenuhnya dibenahi pemerintah Kabupaten Toraja Utara, namun kunjungan wisatawan ke Toraja Utara menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari pengunjung baik itu dalam negeri maupun luar negeri tercapai dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Ke'te Kesu. Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa yang sudah di lakukan, namun ada beberapa hal yang sudah di lakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Ke'te Kesu. Akan tetapi masih ada saja keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur

berupa toilet serta akses jalan. Dari unsur pengeorganisasian, Pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata, dan dari unsur Pengawasan, walaupun dari pemerintah sudah menurunkan langsung stafnya, masih ada saja keluhan dari pengunjung. Namun sejauh ini pemerintah telah menurunkan Satpol PP untuk membantu mengawasi lokasi Objek Wisata, apalagi dalam hari libur.

2.7. Kerangka Pemikiran

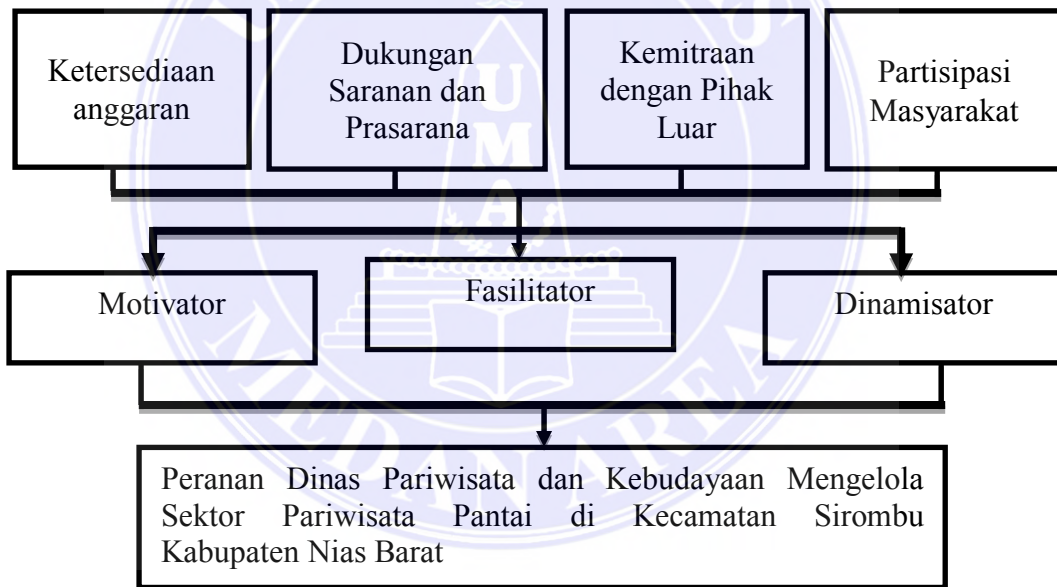
Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kerangka pemikiran sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto (2006:65) mengemukakan “kerangka pemikiran adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas, yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan objek penelitian, instrumen, pengumpulan data serta wilayah pengambilan data”.

Dinas Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki dampak berjenjang (*Multiplier effect*) mampu menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya dan lain sebagainya.

Pariwisata ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sendirinya, namun dibutuhkan beberapa faktor penting pendukung. Salah satu faktornya yaitu peranan pemerintah Indonesia, baik itu dalam hal pembuatan kebijakan yang mendukung, maupun sebagai *promotor* utama kedalam maupun keluar negeri.

Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dari waktu ke waktu menjadi berkembang dan lebih kuat. Melalui peranannya sebagai *promotor*, pemerintah diharapkan mampu mengangkat potensi-potensi pariwisata di Indonesia yang dirasa masih belum optimal pengelolaannya.

Dengan melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, maka keberhasilan di sektor pariwisata tidak akan bisa dilepaskan dari peranan pemerintah dalam rangka mengelola dan mengangkat potensi-potensi yang strategis di bidang kepariwisataan. Bila disajikan dalam sebuah bagan, maka gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode ini dimulai dari analisis berbagai data yang dihimpun dari penelitian, kemudian bergerak ke arah kesimpulan. Tujuan dari metode ini tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran saja tetapi memahami kebenaran tersebut.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018.

3.3. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian yang peneliti butuhkan adalah :

1. Informan Kunci. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.
2. Informan Utama. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.
3. Informan Tambahan. Pengunjung.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

1. Observasi. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara Mendalam. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.”
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang”. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh”

“Aktivitas dalam analisis data meliputi: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing verification* (penarik kesimpulan). (Sugiyono, 2007:337).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini jelas sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. *Conclusion Drawing Verification* (Penarik Kesimpulan).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6. Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong (2009:324) “Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji Kredibilitas (*Credibility*) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

2. Keteralihan (*Transferability*)

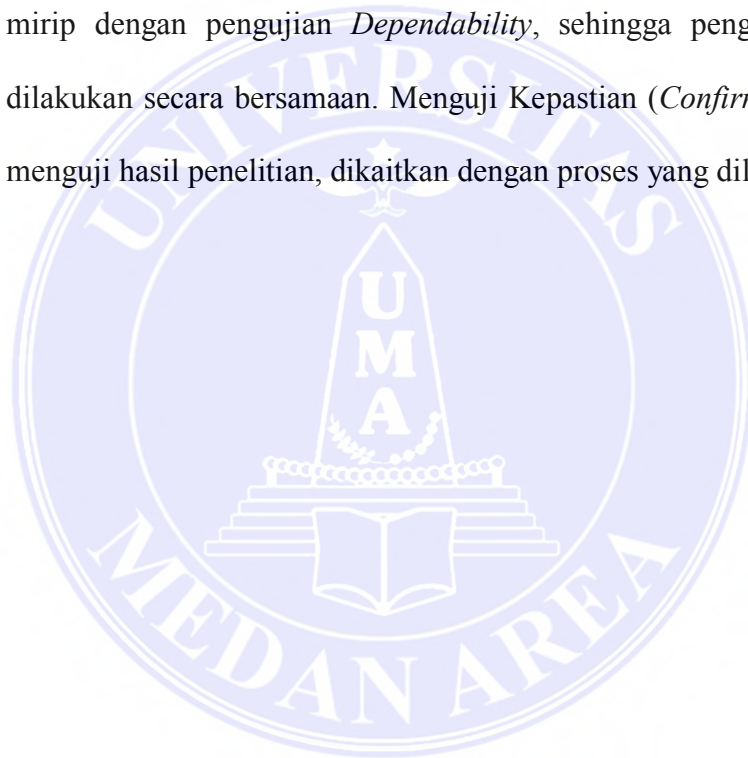
Pengujian Keteralihan (*Transferability*) dimaksudkan untuk menguji derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif uji Kebergantungan (*Dependability*) dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reabel* atau *dependable*.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian Kepastian (*Confirmability*) dalam penelitian kualitatif mirip dengan pengujian *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji Kepastian (*Confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat

Kecamatan Sirombu merupakan salah satu daerah di Kabupaten Nias Barat yang mempunyai luas sekitar 124,5 km², dimana desa terluas di Kecamatan Sirombu adalah desa Hilimberua Na'a yang mempunyai luas sekitar 11,24 km² atau sekitar 11,24% dari luas Kecamatan Sirombu, sedangkan desa Sinene Eto dan desa Tetelesi mempunyai luas yang paling kecil yaitu sekitar 0,60 km² atau sekitar masing-masing 0,60%. Kecamatan Sirombu berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe Barat di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan dan Barat, dan Kecamatan Lahomi di sebelah Timur. (*Sumber: BPS Kecamatan Sirombu Dalam Angka 2017*).

Iklm di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat cenderung dingin karena terletak di daerah khatulistiwa yang mengakibatkan curah hujan cukup tinggi. Menurut data dari Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Binaka Gunungsitoli, rata-rata hujan pertahun 221,9 mm dan banyaknya curah hujan dalam setahun 240 hari atau rata-rata 20 hari perbulan pada tahun 2009. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alam menjadi sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan datang silih berganti dalam setahun. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara berkisar antara 18,1°-31,3° dengan kelembahan sekitar 89-92 persen dan kecepatan angin antara 5-6 knot/jam. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan sering kali disertai dengan musim badai laut, biasanya berkisar antara bulan

September sampai November, namun kadang badai terjadi juga pada bulan Agustus, karena cuaca bisa berubah secara mendadak.

Kecamatan Sirombu terdiri dari beberapa wilayah administrasi berupa puluhan desayaitu: Hilimberuana'a, Lahusa, Sisobaöhö, Ombölata, Tetehösi, Tögimbögi, Bawözamaiwö, Sitölubanua, Lölögundre, Iraonogaila, Sisobandrao, Fadoro, Tugalagawu, Sirombu, Tögide'u, Tugala, Orahili, Gunung Cahaya, Tiga Serangkai, Onowaembo, Onolimbu, Hiliadulo, Sisobambowo, Lölöwa'u, Lahömi, Bawosalo'o, Imana, Tuwa-tuwa, Kafo-kafo, Bawa Sawa, Pulau Bögi, Halamona, Hanöfa, Lahawa, Hinako, Sinene'eto, Balöwondratö.

4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat

Jumlah penduduk Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tahun 2016 adalah 9.740 jiwa, yang terdiri dari 4.728 laki-laki dan 5.012 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 124,55 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Sirombu adalah 78 jiwa/km². Penyebaran penduduk Kecamatan Sirombu terbesar di desa Maliwa'a. *Sex ratio* Kecamatan Sirombu adalah sebesar 94%, yang artinya penduduk perempuan lebih banyak sebesar 6% dibanding dengan penduduk laki-laki. *Sex ratio* tertinggi berada di desa Imana yaitu sebesar 164%, dan *sex ratio* terkecil berada di desa kafo-kafo, sebesar 80%.

4.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat

A. Visi Dinas

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021 dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), maka Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat menetapkan Visi: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NIAS BARAT MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Nias Barat menjamin keberlangsungan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pokok-pokok Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi Daerah Tujuan Wisata, artinya bahwa dengan berbagai keunikan, keindahan dan nilai keragaman kekayaan alam dan budaya diharapkan Sumatera utara dapat menjadi sasaran/tujuan kunjungan wisata.
- b. Berbudaya, artinya bahwa menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.
- c. Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Nias Barat diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

B. Misi Dinas

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan mempunyai nilai jual.
2. Meningkatkan pemasaran dan promosi wisata serta memberikan pemahaman sadar wisata kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata, dan juga sosialisasi tentang pengembangan pariwisata, baik itu wisata bahari, wisata alam, wisata pantai, wisata kuliner dan wisata sejarah.
3. Meningkatkan Industri Kepariwisataan.
4. Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya yang bermakna meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang budaya.
5. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang bermakna peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pengembangan standart kompetensi dan sertifikasi terhadap profesi pelaku kebudayaan dan pariwisata serta peningkatan kerjasama dan kemitraan/kelembagaan.

C. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Nias Barat akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menjadikan Kabupaten Nias Barat sebagai daerah destinasi wisata Nasional dan Internasional.
2. Menjadikan pariwisata yang terintegrasi, yang berbudaya, berkualitas dan memiliki daya saing serta peningkatan citra Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan ekowisata dan destinasi wisata bahari.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana zona ekonomi kreatif, kepariwisataan dan kebudayaan.
5. Melaksanakan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara komprehensif.
6. Melaksanakan *event* pariwisata, atraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.
7. Mengembangkan industri kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif di beberapa sektor seperti hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa pariwisata lainnya.
8. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal dan situs bersejarah.
9. Menciptakan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

D. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat secara berkelanjutan atau berkesinambungan dan merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

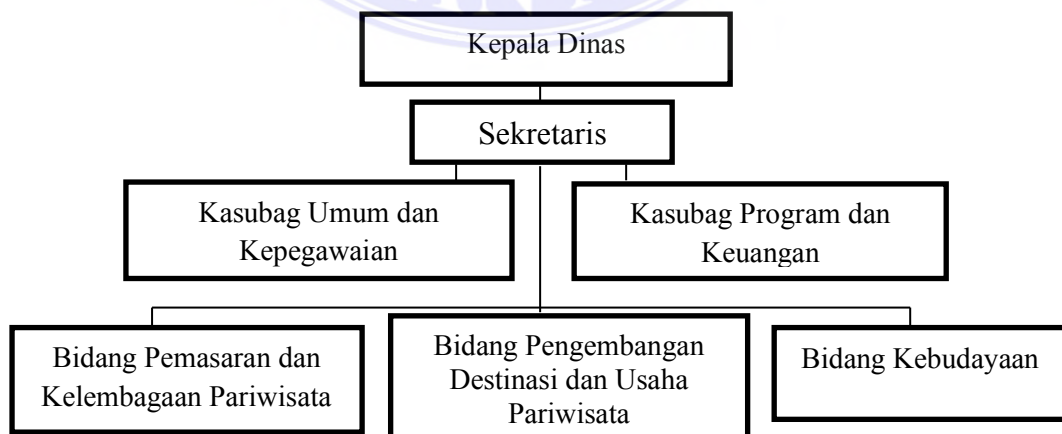
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga akan tercapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Nias Barat sebagai daerah destinasi wisata Nasional dan Internasional.
2. Terwujudnya pariwisata yang terintegrasi, yang berbudaya, berkualitas dan memiliki daya saing serta peningkatan citra Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tujuan wisata.
3. Terwujudnya pengembangan ekowisata dan destinasi wisata bahari.
4. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana zona ekonomi kreatif, kepariwisataan dan kebudayaan.
5. Terwujudnya pelaksanaan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara komprehensif dengan indikator.

6. Terwujudnya pelaksanaan *event* pariwisata, atraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.
7. Terwujudnya pengembangan industri kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif di beberapa sektor seperti hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa pariwisata lainnya.
8. Terwujudnya pelaksanaan pelestarian dan pengembangan budaya lokal dan situs bersejarah.
9. Terwujudnya jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

4.4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat:



Sumber : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi di atas dijelaskan mengenai Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada bidang pariwisata dan kebudayaan, adalah sebagai berikut;

- a. Dinas: sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris: sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program dan Keuangan; sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- c. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
- e. Bidang Kebudayaan.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata serta kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan kebudayaan.
 - b. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan kebudayaan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan usaha pariwisata serta kebudayaan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian Tugas Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan bidang kebudayaan.
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan bidang kebudayaan.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan bidang kebudayaan.
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- e. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP pemerintah daerah, RENSTRA dan RENJA.
- f. Mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- g. Mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- h. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dan bidang kebudayaan.
- i. Melaksanakan pembinaan pegawai dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi dan perizinan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- k. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
- l. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
- m. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.

- n. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

1. Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
2. Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Sekretaris mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas.
 - b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
 - c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.

- d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- e. Melaksanakan penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP pemerintah daerah, RENSTRA dan RENJA.
- f. Melaksanakan penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- g. Melaksanakan penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
 - b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
 - c. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan.
 - d. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai.
 - e. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan.
 - f. Mengelola data dan dokumentasi pegawai.
 - g. Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan.
 - h. Menyiapkan dan memproses Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
 - i. Melaksanakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
 - j. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi.
 - k. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.
 - l. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

D. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Kepala Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
 - b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
 - c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas.
 - e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas guna evaluasi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
 - h. Melaksanakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).

- i. Menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP Pemerintah Daerah.
- j. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
- k. Menghimpun bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk RENSTRA, RENJA, dan RKA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
- l. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara.
- m. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
- n. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
- o. Melaksanakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- p. Mengawasi pembayaran gaji pegawai.
- q. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- r. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

E. Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan Pariwisata

1. Kepala Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pemasaran, pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
2. Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
 - c. Pengelolaan bahan Pemasaran Pariwisata.
 - d. Pengelolaan Pemasaran Pariwisata.
 - e. Pengelolaan pembinaan *event*/peristiwa pariwisata.
 - f. Pengelolaan hubungan antar lembaga pariwisata.
 - g. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
 - b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
 - c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam Pelaksanaan Tugas.
 - f. Melaksanakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).

- g. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- h. Melaksanakan pengembangan sistem informasi Pariwisata.
- i. Menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan pemasaran wisata berupa cd, brosur, *leaflet*, *booklet* dan lain-lain untuk kebutuhan pemasaran Pariwisata.
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan pemasaran dan kelembagaan Pariwisata.
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka mengikuti atau mengadakan penyelenggaraan *event* pemasaran pariwisata.
- l. Menyiapkan rumusan penetapan tagline pariwisata kabupaten.
- m. Melaksanakan penyusunan laporan kunjungan wisatawan.
- n. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang.
- o. Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi sadar wisata.
- p. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, *pers*, LSM maupun masyarakat.
- q. Melaksanakan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan Lokal, Nasional maupun Internasional.
- r. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan.
- s. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- t. Memberikan usul dan saran kepada atasan.

- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing Usaha pariwisata.
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan destinasi dan usaha Pariwisata.
 - c. Pengelolaan pengembangan destinasi wisata.
 - d. Pengelolaan pengembangan dan peningkatan usaha wisata.
 - e. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi dan usaha Pariwisata.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
- h. Menyusun program Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
- i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata dan usaha pariwisata.
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, usaha pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
- k. Melaksanakan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata dan usahapariwisata.
- l. Meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata.

- m. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi serta hiburan umum.
- n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pariwisata dan usaha jasa Pariwisata.
- o. Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan objek dan usaha Pariwisata untuk peningkatan pelayanan Pariwisata.
- p. Menyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
- q. Menetapkan inventarisasi obyek dan kawasan.
- r. Menyusun dan menetapkan pedoman standarisasi produk pariwisata.
- s. Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- t. Menyelenggarakan pemberian izin usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan iklim usaha Pariwisata.
- u. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Pengembangan Destinasi dan UsahaPariwisata.
- v. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- w. Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

H. Bidang Kebudayaan

1. Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan bidang kebudayaan meliputi kesenian, sejarah dan nilai-nilai tradisional serta keurbakalaan.
2. Kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan.
 - b. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan dibidangkebudayaan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Rincian tugas Kepala Bidang Kebudayaan:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
 - b. Menyelenggarakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan pengembangan dan pelestarian seni budaya rencana jangka menengah dan tahunan.
 - c. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
 - d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
 - e. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

- g. Melaksanakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- h. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengembangan kebudayaan daerah.
- i. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pelestarian dan bina kebudayaan daerah.
- j. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesenian daerah.
- k. Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dalam meningkatkan apresiasi seni budaya.
- l. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan apresiasi seni tradisional dan modern.
- m. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi/pelestarian seni budaya kepada masyarakat.
- n. Menyelenggarakan peningkatan lembaga budaya dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
- o. Menyelenggarakan pemberian penghargaan/Anugrah bagi insan/ Lembaga Seni Budaya.
- p. Merumuskan bahan kajian dan sosialisasi, pemberdayaan organisasi sosial budaya, hubungan antara budaya dan pola lingkungan budaya.
- q. Melaksanakan penggalian potensi dan pelestarian budaya, sejarah, kepurbakalaan dan penelitian arkeologi; merumuskan bahan pengumpulan dan pemeliharaan/perawatan data, dokumentasi dan benda-benda sejarah bangsa dan daerah.
- r. Menyelenggarakan kegiatan festival seni budaya.

- s. Menyelenggarakan pengawasan/monitoring kegiatan seni budaya.
- t. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran benda-benda bersejarah dan kepurbakalaan.
- u. Merumuskan bahan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kesenian, atraksi kesenian/keramaian rakyat.
- v. Merumuskan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten.
- w. Merumuskan bahan penetapan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada Bangsa dan Negara skala Kabupaten.
- x. Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi, pemetaan sejarah skala kabupaten sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- y. Melaksanakan pengkajian dan penelitian sejarah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- z. Melaksanakan penerapan kebijakan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan:
 - a) Melaksanakan penetapan Benda Cagar Budaya, Situs skala Kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - b) Melaksanakan pedoman pendirian Museum dan kebijakan pengelolaan museum di Kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c) Melaksanakan Pengembangan dan Pemanfaatan Museum di Kabupaten.
 - d) Melaksanakan Penambahan dan Penyelamatan koleksi museum di Kabupaten.

- e) Melaksanakan penerapan pedoman, penelitian arkeologi dan pengangkatan peninggalan bawah air, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- g) Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.5.1. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat

Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat memiliki kekayaan wisata pantai yang tidak kalah keindahannya dengan wisata yang terdapat di Indonesia. Tujuh pantai dua pulau, khususnya menjadi andalan masyarakat Nias Barat dan Indonesia pada umumnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk pada tahun 2016, yang sebelumnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Pada dasarnya kegiatan mengelola sektor pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Nias Barat diwujudkan melalui dua bagian, yang pertama adalah pada bagian pengembangan potensi pariwisata itu sendiri, serta bagian pemasaran dan promosi wisata. Masing-masing bagian ini memiliki peranannya

tersendiri dalam hal mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Bagian pengembangan wisata memiliki peranan dan kewajiban untuk mengakomodir sarana dan prasarana di seluruh objek wisata pantai dan usaha wisata yang terdapat di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, seperti penyediaan akses jalan menuju objek wisata, penyediaan toilet, pondok wisata, kuliner serta penyewaan transportasi pantai seperti *speedboat dan boat* sedangkan bagian pemasaran dan promosi wisata secara garis besar berperan dalam rangka mempromosikan objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Nias Barat khususnya wisata pantai kepada wisatawan melalui berbagai program yang telah disusun sebelumnya seperti melakukan sosialisasi kepada penduduk, mengikuti *event-event* pariwisata baik di Provinsi Sumatera Utara sendiri maupun luar Provinsi Sumatera Utara, dan juga promosi melalui media sosial.

Pengelolaan pariwisata, selain dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah juga dapat digunakan sebagai sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan melihat beragamnya potensi pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Daerah sebagai salah satu *stakeholder* pengembang pariwisata sudah seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat Nias Barat.

Sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nias Barat Terwujudnya Kabupaten Nias Barat Menjadi Daerah Tujuan Wisata Yang Berbudaya dan Berdaya Saing. Untuk menjalankan misi yang pertama Dinas Pariwisata meningkatkan penataan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan mempunyai nilai jual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamidalubis Daeli selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat:

1. *Tujuannya menjadikan Kabupaten Nias Barat sebagai daerah destinasi wisata Nasional dan Internasional. Sasaran terwujudnya Kabupaten Nias Barat sebagai daerah destinasi wisata Nasional dan Internasional.*
2. *Tujuan Mengembangkan ekowisata dan destinasi wisata bahari; sasaran terwujudnya pengembangan ekowisata dan destinasi wisata bahari;*
3. *Tujuan mengembangkan sarana dan prasarana zona ekonomi kreatif, kepariwisataan dan kebudayaan, sasaran terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana zona ekonomi kreatif, kepariwisataan dan kebudayaan.*(Wawancara pada 26 Maret 2018).

Pariwisata merupakan kegiatan secara langsung yang menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga terdapat timbal balik antara masyarakat dan Pariwisata. Boleh dikatakan Pariwisata mempunyai energi yang cukup besar yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, budaya dan hubungan sosial. Bahkan banyak Negara maupun Kabupaten/Kota bergantung dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan.

Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Elfira H Mulani, S.I.Kom selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Nias Barat:

“Pengelolaan yang dilakukan meningkatkan pemasaran dan promosi wisata serta memberikan pemahaman sadar wisata kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata, dan juga sosialisasi tentang pengembangan pariwisata khususnya wisata pantai”. (Wawancara pada 29 Maret 2018).

Di samping meningkatkan pemasaran dan promosi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dalam pengelolaan secara mendasar mengacu

pada beberapa konsep. Hasil wawancara dengan Bapak Hamidalubis Daeli selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat:

“Pengelolaan parawisata Kabupaten Nias Barat secara mendasar mengacu pada beberapa konsep seperti, konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pengembangan wilayah terpadu, konsep pengembangan produk, konsep pengembangan pemasaran dan investasi, konsep pengembangan kelembagaan, dan konsep pengembangan lingkungan”.(Wawancara pada 26 Maret 2018).

Kegiatan parawisata pada dasarnya adalah kegiatan manusia yang dalam mobilitasnya didorong oleh keingintahuan dan menikmati objek wisata dan atraksi wisata tanpa mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu konsep pengembangan wilayah terpadu dapat mengatasi dan membantu perbedaan administratif antar wilayah Kabupaten menjadi kesatuan perencanaan dan pengembangan wilayah dengan kegiatan pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Pengembangan pemasaran pariwisata perlu memperhatikan segmen pasar dan karakteristik wisatawan. Kecenderungan yang selama ini telah ada perlu dipelajari dan ditekuni dengan upaya promosi secara lebih mendalam, sehingga wisatawan lokal dan mancanegara yang pernah datang ingin mengulangi pengalamannya kembali.

Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Saudari Komite Riang Daeli selaku pengunjung wisata pantai yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat:

“Perkembangan wisata pantai di Kecamatan Kabupaten Nias barat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas, sarana dan prasana yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat seperti penyediaan penginapan, penyediaan toilet, penyediaan

transportasi, dan penyediaan kuliner bagi pengunjung”. (Wawancara pada 24 Maret 2018).

Investasi memainkan peranan amat penting dalam masyarakat yang sedang membangun. Investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi Nasional. Karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan PAD dari retribusi dan pajak daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana dan Gayatri (2005:95), Pemerintah Daerah memiliki peranan untuk mengembangkan atau mengelola potensi Pariwisata di daerahnya sebagai :

1. Motivator

Dalam pengembangan pariwisata, peranan Pemerintah Daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang Pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengembangan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dukungan investor, pengusaha wisata serta masyarakat. Investor sebagai pemilik modal dapat menanamkan modalnya di objek-objek wisata, pengusaha di bidang Pariwisata dapat mengembangkan usahanya sekaligus dapat membantu mengembangkan pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dan masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perkembangan Pariwisata di lingkungan mereka.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Hamidalubis Daeli selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan beberapa upaya untuk memotivasi kalangan investor, pengusaha wisata serta masyarakat agar tertarik turut serta mengembangkan dan mengelola potensi Pariwisata pantai di Kabupaten Nias Barat melalui program sosialisasi sadar wisata, pelatihan pengelolaan usaha wisata, sampai dengan dukungan dana stimulant bagi usaha wisata berbasis masyarakat”. (Wawancara pada 26 Maret 2018).

Melalui program sosialisasi dan promosi wisata, Dinas Pariwisata juga terus mengupayakan kalangan Investor dan Pengusaha wisata agar tertarik turut mengembangkan potensi pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, namun peneliti melihat upaya tersebut juga masih belum optimal, sehingga investor dan pengusaha wisata selama ini belum tertarik untuk ikut mengembangkan potensi pariwisata pantai di Kabupaten Nias Barat.

2. Fasilitator

Sebagai fasilitator pengelolaan potensi Pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, peranan Pemerintah Daerah adalah untuk menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Elfira H Mulani, S.I.Kom selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Nias Barat:

“Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah menyediakan sarana prasarana objek wisata, memfasilitasi pengembangan obyek wisata, penyediaan informasi terkait potensi ekonomi wisata pada pihak ketiga sampai dengan promosi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Nias Barat”.(Wawancara pada 29 Maret 2018).

Pada dasarnya, peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata, organisasi pariwisata di Kabupaten Nias Barat terkandung mengenai tugas dan fungsi pokok organisasi terendah Dinas. Selama ini upaya pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana di objek wisata, seperti pembangunan fasilitas

umum, pembangunan fasilitas pokok Pariwisata, sampai dengan pembangunan fasilitas pendukung usaha Pariwisata.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Elfira H Mulani, S.I.Kom selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Nias Barat:

“Khusus untuk penyediaan sarana prasarana objek wisata, peranan Dinas Pariwisata masih sangat dominan, sedangkan pada realitanya sumber anggaran yang dimiliki Dinas terbatas, sehingga sarana prasarana di beberapa objek wisata terlihat masih sangat kurang jumlahnya. Faktor yang paling mempengaruhi adalah masih minimnya partisipasi dari pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata yang secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah sebagai stakeholder pengembang wisata untuk memfasilitasi sebagian besar sarana prasarana yang terdapat di objek wisata, akibatnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tersebut seakan-akan hanya habis untuk membiayai penyelenggaraan di objek-objek wisata”. (Wawancara pada 26 Maret 2018).

Investor dan pengusaha wisata sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan sudah seharusnya juga memberikan kontribusi yang lebih dalam pengembangan Pariwisata, sehingga Pemerintah Daerah sebagai salah satu *stakeholder* wisata tidak kewalahan khususnya dalam pembiayaan pengembangan Pariwisata, lebih jauh lagi, Pemerintah Daerah harus mampu bersinergis dengan pihak lain, sehingga permasalahan tentang keterbatasan sumber daya dapat diatasi.

3. Dinamisator

Dalam pilar *Good Governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergis dengan baik. Pemerintah Daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan Pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat memiliki peranan untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan Pariwisata.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Hamidalubis Daeli selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat:

“Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengelolaan pariwisata pantai di Kabupaten Nias Barat, selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui berbagai kesempatan dialog mengenai perkembangan pariwisata dengan pihak-pihak tersebut”.(Wawancara pada 26 Maret 2018).

Upaya untuk mensinergiskan antar *stakeholder* ini peneliti nilai masih dalam taraf normal, namun mengingat kondisi pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat yang membutuhkan suatu inovasi lebih, pemerintah daerah seharusnya perlu meningkatkan peranannya ini secara lebih *intens* lagi.

Adapun pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat yang sedang dikelola dan diharapkan perkembangan potensinya adalah dua pulau dan tujuh pantai, sebagai berikut:

Pulau Asu



(Sumber: www.lihat.co.id)

Gambar 4.2. Pulau Asu

Pada awalnya mungkin banyak orang yang akan berpikiran bahwa Pulau ini berbentuk Anjing atau dihuni oleh banyak Anjing. Akan tetapi tidak, memang nama Asu juga berarti Anjing namun nama Asu disini adalah sebuah nama objek wisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Pulau Asu terletak di Kepulauan Hinako, Kecamatan Sirombu, berada di sebelah Barat Kabupaten Nias Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan merupakan salah satu pulau terluar di Kepulauan Nias. Pulau ini dapat diakses dengan kapal tradisional maupun *speedboat*. Pantai di pulau ini berpasir putih dan halus dengan laut bening berwarna biru toska. Bagi yang hobi wisata pantai, pantai ini cocok untuk kegiatan berjemur, berenang, menyelam, *snorkeling*, *tracking*, keliling pulau, memancing. Terdapat juga *surfingpoint* yang sangat disukai oleh peselancar yang umumnya berasal dari Manca Negara.

Pulau Bawa



(Sumber: www.lihat.co.id)

Gambar 4.3. Pulau Bawa

Pulau Bawa berada di wilayah Kecamatan Sirombu dengan luas 7.18 km², pulau ini dapat diakses dengan perahu tradisional maupun *speedboat* dari pelabuhan Sirombu. Pulau Bawa memiliki ombaknya yang besar, panjang dan tinggi membuat *surfing* anda tidak akan pernah terlupakan dalam hidup anda. Destinasi wisata di Kepulauan Nias Barat ini cocok untuk para *surfer* yang sedang mencari ombak tantangan. Dan uniknya, di pulau ini terdapat sebuah danau kecil. Bagi pengunjung yang berenang di danau ini harus berhati-hati karena di dasar danau terdapat “lumpur hisap”.

Pantai Fari'i



(Sumber: www.hetanews.com)

Gambar 4.4. Pantai Fari'i

Pantai Fari'i terletak di Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu, tak jauh dari Pantai Falaete, sekitar 2 km ke arah selatan. Pengunjung bisa menyewa perahu nelayan untuk menuju pulau tersebut atau jika pasang surut pengunjung dapat berjalan kaki menyeberang laut menuju pulau itu untuk memancing atau menikmati keindahan Pantai di pulau kecil tersebut. Disebelah kiri Pantai Fari'i terdapat muara yang indah dan alami. Di Pantai Fari'i terdapat beberapa pondok yang diselang-selingi oleh barisan pohon Cemara. Hamparan pasir luas membuat

pantai ini cocok sekali sebagai tempat bermain voli pantai. Namun tidak ada penjual makanan di dalamnya, pengunjung sebaiknya membawa bekal makan dan minum dan keperluan piknik lainnya.

Pantai Valaete



(Sumber:travel.com.kupas)

Gambar 4.5.Pantai Valaete

Pantai Valaete terletak di Desa Lahusa Kecamatan Sirombu. Membutuhkan waktu 45 menit dari kota Kabupaten Nias Barat ke pantai Valaete. Pantai Valaete berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Deburan ombak dan bukit-bukit batu karang yang besar dengan ketinggian mencapai 20 meter menjadi daya tarik pantai Valaete. Jika kita berdiri di puncak batu karang yang tinggi, kita dapat melihat pemandangan laut lepas yang indah.

Pantai Wazi

Lokasi pantai Wazi berada di Desa Tetehosi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Pantai ini masih sangat alami. Garis pantai ini panjang dengan pasir yang lembut. Anda dapat mendapatkan sensasi tidur di pantai sambil

menikmati birunya laut. Selain duduk bersantai menikmati pemandangan pantai, kegiatan lain yang dapat dilakukan di pantai ini adalah berselancar.

Pantai Ture



Gambar 4.6. Pantai Ture

Pantai Ture terletak di Desa Tugala Gawu Kecamatan Sirombu. Pantai ini satu garis dengan pantai Sirombu, pantai ini sangat lebar serta bersih.

Pantai Fadaya



(Sumber: www.lihat.co.id)

Gambar 4.7. Pantai Fadaya

Pantai Fadaya berada di sebelah kanan Dermaga Sirombu. Gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Nias pada tahun 2005 mengakibatkan sisimik dimana

batu-batu karang terangkat dan membentuk formasi yang unik. Itulah yang menjadi keunikan di pantai ini. Hamparan rumput yang luas menjadi akses masuk ke pantai Fadaya.

Pantai Gu'u



Gambar 4.8. Pantai Gu'u

Terletak di sebelah barat pantai Sirombu. Pantai Gu'u memiliki pemandangan *sunset* yang luar biasa. Di pantai Gu'u dapat menyaksikan aktifitas Nelayan yang menangkap ikan. Garis pantai Gu'u lumayan panjang sehingga pengunjung dapat berjalan kaki menyusir pantai sambil menikmati panorama laut di pantai Gu'u.

Pantai Sirombu



(Sumber: www.lihat.co.id)

Gambar 4.9. Pantai Sirombu

Pantai Sirombu terletak di Kecamatan Sirombu, sekitar 12 km dari ibu kota Kabupaten. Keindahan *sunrise* dan *sunset* dapat dilihat di kawasan pantai Sirombu. Pengunjung tak perlu berpindah dari satu pantai ke pantai yang lain. Di pantai Sirombu terdapat beberapa Gajebo untuk bersantai ria sambil menikmati indahnya pantai dan tersedia beberapa rumah makan yang menyajikan aneka hidangan laut (*seafood*) dan air kelapa muda.

4.5.2. Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Nias Barat

Ada beberapa hambatan yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat mengelola sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu:

1. Dana yang terbatas

Faktor yang mempengaruhi tidak dan lancarnya pengelolaan pariwisata pantai adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Nias Barat juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Lokasi geografis objek wisata.

Bagi objek wisata yang berada sangat jauh dari pusat kota seperti dan di Luar Pulau Sumatera akses yang terlalu sulit dijangkau oleh wisatawan.

3. Minimnya dan tidak terpusatnya Informasi.

Kesulitan yang dialami wisatawan khususnya wisatawan asing adalah minimnya informasi mengenai suatu objek wisata, serta tidak dimaksimalkannya *Tourist Information center*. Sehingga para wisatawan harus mencari informasi sendiri mengenai objek wisata, letaknya dan apa saja yang ditawarkan dari objek wisata tersebut.

Dapat dilihat dari masih sepiunya kegiatan usaha dan Dinas Pariwisata pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Masih minimnya jalinan dengan pihak ketiga tersebut disebabkan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah:

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Elfira H Mulani selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Nias Barat:

“Faktor anggaran yang terbatas, sehingga menjadi terbatas pula peran penyediaan fasilitas oleh Dinas Pariwisata. Serta akses yang susah di jangkau. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan di objek wisata tersebut lalu turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Nias Barat, dan masih minimnya promosi

serta informasi akan potensi ekonomi wisata pada pengusaha wisata juga menghambat pihak ketiga tertarik mengembangkan usahanya” (wawancara pada 29 Maret 2018).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ;

1. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat :

a. Sebagai Fasilitator

Dalam rangka melaksanakan peranannya sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana prasarana di objek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan pihak investor dan pengusaha wisata, memasarkan objek wisata, memfasilitasi kelompok masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana stimulant, dan lain sebagainya.

b. Sebagai Motivator

Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Nias Barat dibutuhkan peranannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan pengusaha wisata. Pentingnya kesadaran masyarakat Kabupaten Nias Barat terhadap pariwisata menuntut peranan Dinas Pariwisata agar terus memberikan motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulant.

c. Dinamisator

Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, Dinas Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerjasama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui dialog pada saat penyelenggaraan event promosi wisata, dialog pada saat sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat, serta peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyedia sarana prasarana umum penunjang kebutuhan pengembangan pariwisata.

2. Hambatan-hambatan Dinas Pariwisata dalam Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat adalah anggaran yang terbatas, sehingga menjadi terbatas pula peran penyediaan fasilitas oleh Dinas Pariwisata. Serta akses yang susah di jangkau. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan di objek wisata tersebut lalu turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Nias Barat, dan masih minimnya promosi serta informasi akan potensi ekonomi wisata pada pengusaha wisata juga menghambat pihak ketiga tertarik mengembangkan usahanya.

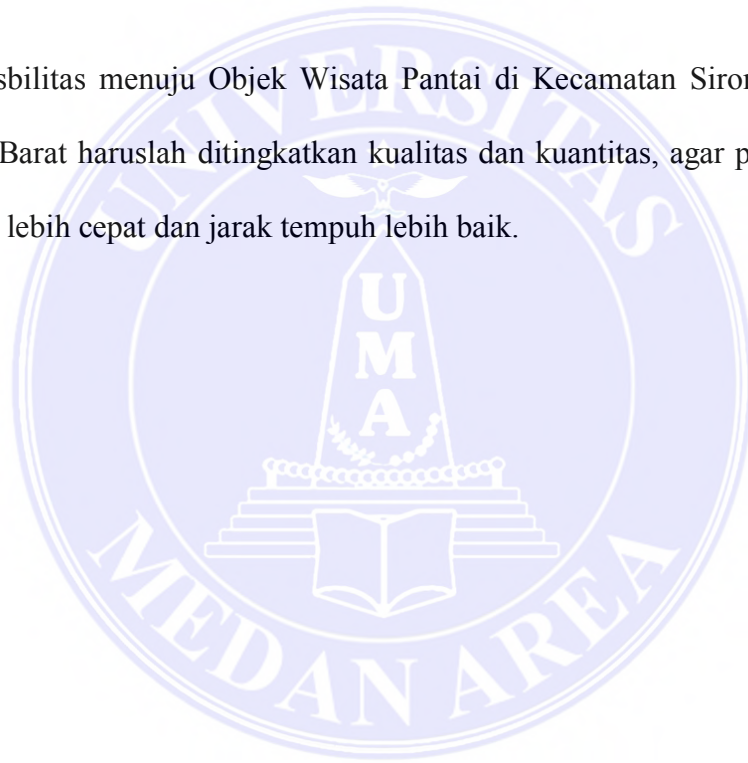
5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan :

1. Pengelolaan kawasan objek wisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat perlu kerja sama dengan penyedia jasa pariwisata, seperti *Travel*

Agent dan meningkatkan promosi wisata baik dengan media cetak maupun media elektronik serta mengikuti setiap *event* yang diadakan di luar daerah untuk mempromosikan pariwisata dan budaya masyarakat Nias Barat.

2. Pemerintah seharusnya dapat melihat dan mendengar betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh objek wisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi agar menjadi salah satu objek wisata andalan.
3. Aksesibilitas menuju Objek Wisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat haruslah ditingkatkan kualitas dan kuantitas, agar para pengunjung dapat lebih cepat dan jarak tempuh lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit: Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktekRineka*, Cipta: Jakarta.
- Bram, Made I., 2006. Tesis: *Studi Tentang Kebijakan Pengembangan Parawisata Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana: Denpasar.
- Bukart, A. J. dan Medlik, S. 1981. *Tourism: past, present and future*. Universitas Michigan: Heinemann.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., Haji, 2016. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*. Edisi revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ismayanti, 2010. *Pengantar Pariwisata*. Grasindo: Jakarta.
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Kedua, Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakaya: Bandung.
- Pitana, I Gede dan Putu Gede Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta.
- Prihadhi, Endra K., 2004. *My Potensi*, Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Sinaga, Supriono, 2010. *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Universitas Sumatera Utara.
- Soekadijo, R.G, 2000. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. CV: Bandung.
- Suwantoro, Gamal, 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*, Penerbit Andi: Yogyakarta.

Wahab, Salah, 2003. *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Wiyono, Slamet, 2006. *Manajemen Potensi Diri*, PT Grasindo: Jakarta

Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisata*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013

Jurnal

Alvinita, dkk, 2013. Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hero Theme, 2014. Potensi dan Daya Tarik Pariwisata. Karya Tulis Ilmiah Ilmu Ekonomi. (<http://karyatulisilmiah.com/potensi-dan-daya-tarik-pariwisata/>), diakses 5 September 2015)

Madonna, Marampa, 2012. *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ke'te Kesu Di Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Sam Ratulangi.

Alamat Web-site

Herdiana, Lisa, 2012. Daya Tarik dan Kawasan Wisata dalam <http://lisaherdiana.blogspot.co.id/2012/04/daya-tarik-dan-kawasan-wisata.html?m=1>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah

LAMPIRAN 1

WAWANCARA

PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MENGELOLA SEKTOR PARIWISATA PANTAI DI KECAMATAN SIROMBU KABUPATEN NIAS BARAT

Pertanyaan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat Bapak Hamidalubis Daeli pada tanggal 26 Maret 2018:

1. Apa yang menjadi tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?
2. Terlepas dari strategi yang ada, Dinas Pariwisata menerapkan konsep apa saja dalam mendukung pengelolaan atau perkembangan sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?
3. Motivasi apa yang diberikan oleh Pemerintah kepadapihak-pihak atau elemen pendukung pengelolaan pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dalam mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

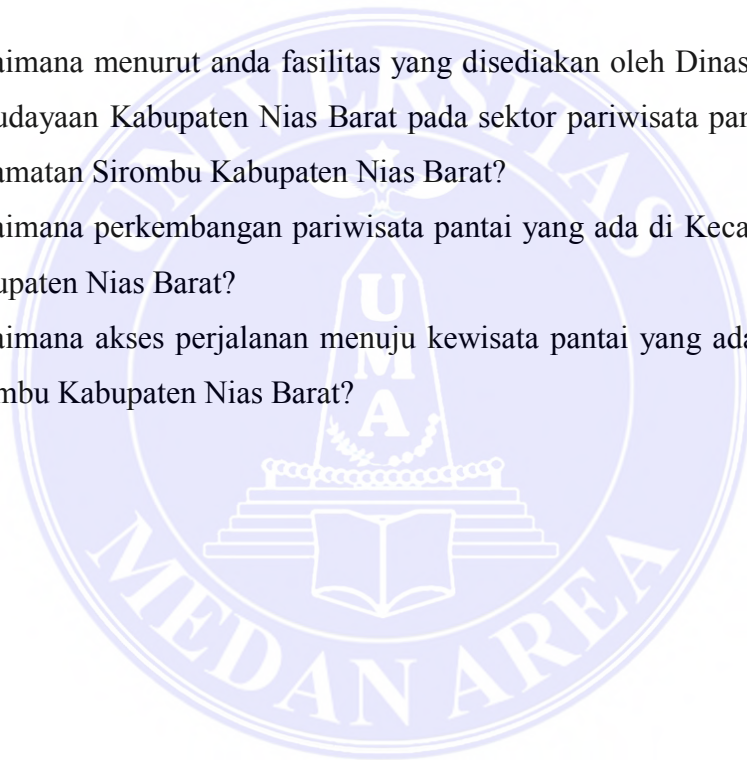
Pertanyaan wawancara kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Nias Barat Ibu Elfira H Mulani, S.I.Kom pada tanggal 29 Maret 2018:

1. Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dalam Mengelola sektor pariwisata pantai di kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?

2. Dalam pengembangan lanjutan, upaya apa dan fasilitas apa saja yang disediakan Pemerintah dalam upaya mengelola atau mengembangkan sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
3. Hambatan apa saja yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dalam mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Pertanyaan wawancara kepada pengunjung Komite Riag Daeli pada tanggal 24 Maret 2018:

1. Bagaimana menurut anda fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat pada sektor pariwisata pantai yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?
2. Bagaimana perkembangan pariwisata pantai yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?
3. Bagaimana akses perjalanan menuju kewisata pantai yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat?



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat



Gedung Balai Serba Guna Pemerintahan Kabupaten Nias Barat.



Penulis bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabuptaen Nias Barat Bapak Hamidalubis Daeli.



Latihan dan persiapan “Folau Owasa Famatere Tei Mbalugu (Pemberian Gelar Seseorang) pada acara Pekan Raya Sumatera Utara 2018.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nias Barat



Sarana Transportasi menuju ke beberapa pariwisata pantai yang ada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.



Salah satu penginapan untuk parawisatawan pulau Asu kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

